



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penyelesaian Kerugian Daerah Capai 75 Persen



ARIE/RB

SOSIALISASI: Wakil Bupati, Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, didampingi Sekda dan sejumlah pejabat berfoto bersama usai melaksanakan kegiatan Sosialisasi TGR di aula Setdakab, Kamis (17/10).

KEPAHIANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu, Aryo Seto Bomantari, SE, MM, Ak.CA mengapresiasi keberhasilan Pemkab Kepahiang dalam melakukan penyelesaian kerugian daerah tahun 2019. Total penyelesaian kerugian daerah mencapai angka 75 persen.

Hal ini disampaikan di sela-sela kegiatan Sosialisasi Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah yang digelar di aula Setdakab Kepahiang, kemarin (17/10). Menurut Aryo, setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan maupun dengan barang milik daerah khususnya keru-

gian daerah. Oleh karena itu perlu diadakannya penyelesaian masalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) baik dalam keuangan atau barang daerah.

TGR merupakan suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ke-

tiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. "Dalam sosialisasi yang kita lakukan tadi, kita membahas mengenai prosedur penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi yang diterapkan pada Badan Keuangan Daerah. Sejauh ini langkah yang dilakukan Pemkab Kepahiang sudah cukup menunjukkan progresifitas yang baik, yakni berhasil menyelesaikan 75 persen permasalahan TGR yang ada di tahun ini," terang Aryo.

Di sisi lain, Asisten III selaku Ketua Pelaksana, Haira Aryani, S.Sos mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan PNS/ASN, OPD, lembaga non struktural yang dibiayai APBD, pihak ketiga dan masyarakat dalam memahami regulasi dan kewajiban dalam penyelesaian kerugian daerah. "Digelarnya kegiatan ini mengetahui prosedur yang diterapkan apakah pelaksanaan TGR yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku atau tidak. Ini merupakan proyek pembenahan yang dilakukan Pemkab kepada sejumlah OPD, seperti BKD, BKDPSDM, Disdikbud, Kominfo, dan Inspektorat," ungkap Haira. (sly)